

ISLAM MASA PERIODE UMAYYAH: PERSPEKTIF SEJARAH KRITIS TENTANG TRANSFORMASI SISTEM KEKUASAAN DAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

Tri Hidayatul Septiana¹, Kholid Mawardi²

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}

e-mail: trihidayatulseptiana@gmail.com¹, kholidmawardi23@gmail.com²

Diterima: 01/06/2026; Direvisi: 06/06/2026; Diterbitkan: 17/06/2026

ABSTRAK


Kajian mengenai Dinasti Umayyah umumnya lebih banyak menyoroiti aspek ekspansi wilayah dan perkembangan peradaban Islam, sementara kajian yang secara khusus menganalisis transformasi sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat melalui perspektif sejarah kritis masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap perubahan politik dan sosial pada masa Umayyah penting untuk menjelaskan dinamika perkembangan peradaban Islam serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Muslim pada periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat pada masa Dinasti Umayyah melalui pendekatan sejarah kritis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan berbagai literatur sejarah Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah melakukan perubahan sistem kepemimpinan dari model musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi sistem monarki dinasti yang diwariskan berdasarkan garis keturunan. Selain itu, perluasan wilayah kekuasaan Islam mendorong terbentuknya struktur sosial yang semakin kompleks dengan munculnya stratifikasi antara elite penguasa Arab, mawali, dan ahl al-dhimmah. Transformasi tersebut berhasil memperkuat stabilitas politik dan administrasi negara, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial, konflik politik, dan ketidakpuasan kelompok tertentu yang berkontribusi terhadap melemahnya Dinasti Umayyah. Dengan demikian, masa Umayyah merupakan fase transisi penting yang membentuk perkembangan politik dan sosial dalam sejarah peradaban Islam.

Kata Kunci: *Dinasti Umayyah, Sejarah Islam, Transformasi Kekuasaan, Struktur Sosial, Sejarah Kritis.*

ABSTRACT

Studies on the Umayyad Dynasty have generally focused on territorial expansion and the development of Islamic civilization, while research specifically examining the transformation of political power and social structures through a critical historical perspective remains relatively limited. Understanding the political and social changes during the Umayyad period is important for explaining the dynamics of Islamic civilization and their impact on Muslim societies in subsequent periods. This study aims to analyze the transformation of the political system and social structure during the Umayyad Dynasty from a critical historical perspective. The research employs a qualitative method using a library research approach, drawing on books, scholarly articles, and relevant historical literature on Islam. The findings indicate that the Umayyad Dynasty transformed the leadership system from the consultative model practiced during the Rashidun Caliphate into a hereditary dynastic monarchy. Furthermore, the expansion of Islamic territories contributed to the emergence of a more complex social structure characterized by stratification among the Arab ruling elite, mawali, and ahl al-dhimmah. Although these transformations strengthened political stability and state administration, they

Copyright (c) 2026 Budgeting : Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen dan Bisnis

 <https://doi.org/10.51878/budgeting.v1i2>

also generated social inequality, political conflicts, and dissatisfaction among certain groups, which ultimately contributed to the decline of the Umayyad Dynasty. Therefore, the Umayyad period represents a significant transitional phase that shaped the political and social development of Islamic civilization.

Keywords: *Umayyad Dynasty, Islamic History, Political Transformation, Social Structure, Critical History.*

PENDAHULUAN

Dinasti Umayyah merupakan salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam yang berlangsung antara tahun 661-750 M. Masa ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan, perluasan wilayah kekuasaan, serta perkembangan administrasi negara yang semakin kompleks (Maulidan & Rhamadan, 2025). Di bawah kepemimpinan Dinasti Umayyah, wilayah Islam berkembang hingga mencakup Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian Asia Tengah. Perkembangan tersebut menjadikan Dinasti Umayyah sebagai salah satu kekuatan politik terbesar pada masanya (Maulidan & Rhamadan, 2025). Selain memberikan dampak terhadap ekspansi wilayah, perkembangan tersebut juga memengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam secara luas (Larasati et al., 2024).

Perubahan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah tidak hanya berkaitan dengan perluasan kekuasaan, tetapi juga menyangkut transformasi sistem pemerintahan Islam (Azmi & Arbi, 2024). Sistem kepemimpinan yang sebelumnya didasarkan pada musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perubahan menjadi sistem monarki dinasti yang diwariskan berdasarkan garis keturunan (Usri & Fathani, 2022). Transformasi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Islam karena mengubah pola legitimasi dan distribusi kekuasaan dalam pemerintahan (Usri & Fathani, 2022). Perubahan sistem pemerintahan tersebut dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat kontrol kekuasaan di tengah wilayah Islam yang semakin luas (Fajri et al., 2022). Namun demikian, perubahan sistem tersebut juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip politik Islam yang berkembang pada masa awal serta dampaknya terhadap dinamika sosial-politik masyarakat Muslim (Azmi & Arbi, 2024).

Selain transformasi sistem kekuasaan, masa Dinasti Umayyah juga ditandai oleh perubahan struktur sosial masyarakat yang semakin kompleks. Ekspansi wilayah yang luas menyebabkan masyarakat Islam terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama yang hidup dalam satu sistem pemerintahan (Suyadi, Raharusun, & Kodir, 2021). Dalam kondisi tersebut muncul stratifikasi sosial yang menempatkan bangsa Arab sebagai kelompok dominan, sementara kelompok mawali dan ahl al-dhimmah menempati posisi sosial yang berbeda. Struktur sosial yang terbentuk menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang memengaruhi akses terhadap jabatan politik, sumber daya ekonomi, dan status sosial dalam masyarakat (Putra & Arbi, 2025). Fenomena tersebut menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial yang berkembang pada masa Dinasti Umayyah.

Kajian mengenai Dinasti Umayyah telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Azmi dan Arbi (2024) mengkaji kemajuan peradaban Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah dengan menyoroti kondisi sosial dan politik yang mendukung perkembangan peradaban Islam. Sementara itu, Siregar dan Arbi (2024) membahas ekspansi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah serta pengaruhnya terhadap perluasan wilayah kekuasaan dan penyebaran Islam ke berbagai kawasan. Penelitian Ridho et al. (2024) berfokus pada perkembangan peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian sejarah Islam, khususnya terkait perkembangan dan kejayaan Dinasti

Copyright (c) 2026 Budgeting : Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen dan Bisnis

Umayyah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek perkembangan peradaban dan ekspansi kekuasaan sehingga belum secara mendalam mengkaji hubungan antara transformasi sistem kekuasaan dan perubahan struktur sosial masyarakat melalui perspektif sejarah kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian mengenai Dinasti Umayyah. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan deskriptif-historis yang berfokus pada kronologi peristiwa, ekspansi wilayah, serta pencapaian politik dan peradaban pada masa pemerintahan Umayyah (Maysaroh, 2023). Sementara itu, kajian yang menelaah secara mendalam hubungan antara perubahan sistem kekuasaan dan pembentukan struktur sosial masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, keterkaitan antara kekuasaan dan struktur sosial merupakan bagian penting dalam memahami dinamika sejarah Islam secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih mendalam dengan menganalisis transformasi sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat Dinasti Umayyah secara terpadu melalui pendekatan sejarah kritis.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dinamika politik dan sosial Islam klasik sebagai bagian dari pengembangan studi sejarah Islam kontemporer. Analisis mengenai transformasi sistem kekuasaan dan perubahan struktur sosial pada masa Dinasti Umayyah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan institusi politik Islam dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah Islam dengan menghadirkan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek kronologis, tetapi juga pada relasi kekuasaan dan perubahan sosial yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah dan (2) bagaimana perubahan struktur sosial masyarakat yang terjadi sebagai dampak dari transformasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat pada masa Dinasti Umayyah melalui perspektif sejarah kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik dan sosial dalam sejarah peradaban Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian historis kepustakaan (*historical library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis transformasi sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat pada masa Dinasti Umayyah berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data penelitian berupa buku-buku sejarah Islam, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Dinasti Umayyah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta kelengkapan informasi mengenai sistem pemerintahan, dinamika politik, dan struktur sosial masyarakat pada masa Umayyah. Selain itu, penelitian ini mengutamakan penggunaan referensi ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memperoleh informasi yang lebih mutakhir, tanpa mengabaikan sumber-sumber klasik yang memiliki otoritas dalam kajian sejarah Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan sejarah kritis dengan membandingkan berbagai sumber, menelaah konteks sosial-politik yang

melatarbelakangi suatu peristiwa, serta menganalisis hubungan antara perubahan sistem kekuasaan dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta sejarah, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Umayyah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan objektif mengenai dinamika politik dan sosial dalam sejarah peradaban Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian mengenai Dinasti Umayyah menunjukkan bahwa periode ini merupakan salah satu fase penting dalam perkembangan sejarah Islam yang ditandai oleh perubahan politik dan sosial yang cukup signifikan. Berbagai dinamika yang terjadi selama masa pemerintahan Umayyah tidak hanya memengaruhi sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial dalam masyarakat Islam yang semakin luas dan beragam. Perluasan wilayah kekuasaan, penguatan administrasi negara, serta interaksi antara berbagai kelompok etnis dan agama menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap periode Umayyah perlu dilakukan tidak hanya pada aspek kronologis peristiwa, tetapi juga pada perubahan struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap tatanan sosial masyarakat. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai gambaran mengenai transformasi sistem kekuasaan serta perubahan struktur sosial pada masa Dinasti Umayyah.

Tabel 1. Temuan Penelitian

No.	Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Interpretasi Sejarah Kritis
1	Transformasi Sistem Kekuasaan	Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari model syura pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi monarki dinasti yang diwariskan berdasarkan garis keturunan.	Perubahan tersebut tidak hanya merupakan pergantian bentuk pemerintahan, tetapi juga strategi politik untuk menjaga stabilitas pasca-konflik internal umat Islam dan memperkuat legitimasi kekuasaan.
2	Sentralisasi Kekuasaan	Muawiyah memusatkan kekuasaan pada khalifah serta memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.	Kebijakan ini menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan melalui penguatan birokrasi, kontrol wilayah, dan pembangunan pusat politik baru yang lebih strategis.

3	Legitimasi Politik Dinasti Umayyah	Legitimasi pemerintahan tidak hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kekuatan militer, kemampuan politik, dan dukungan elite wilayah Syam.	Kekuasaan diproduksi melalui kombinasi faktor religius dan politik sehingga menunjukkan adanya relasi kuasa yang kompleks dalam pembentukan negara Islam.
4	Perubahan Struktur Sosial	Ekspansi wilayah Islam menghasilkan masyarakat multietnis dan multikultural yang lebih kompleks.	Keberagaman sosial mendorong terbentuknya stratifikasi sosial baru yang dipengaruhi oleh faktor etnis, agama, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.
5	Posisi Bangsa Arab	Bangsa Arab memperoleh akses lebih besar terhadap jabatan pemerintahan, militer, dan distribusi sumber daya negara.	Struktur sosial pada masa Umayyah memperlihatkan dominasi kelompok Arab sebagai elite politik yang memiliki posisi istimewa dalam sistem pemerintahan.
6	Posisi Mawali	Kelompok mawali (Muslim non-Arab) sering memperoleh perlakuan yang berbeda dibanding Muslim Arab meskipun memiliki status keagamaan yang sama.	Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor etnis dan kepentingan politik dinasti.
7	Posisi Ahl al-Dhimmah	Kelompok non-Muslim memperoleh perlindungan negara dan kebebasan beragama dengan kewajiban membayar jizyah.	Kebijakan tersebut mencerminkan mekanisme integrasi masyarakat majemuk sekaligus menunjukkan adanya diferensiasi status sosial dalam sistem pemerintahan Umayyah.
8	Dampak Transformasi Kekuasaan terhadap Masyarakat	Sentralisasi kekuasaan berhasil menciptakan stabilitas politik dan memperluas wilayah Islam, tetapi juga memunculkan ketimpangan sosial dan resistensi politik.	Terdapat hubungan erat antara transformasi sistem kekuasaan dengan pembentukan struktur sosial yang hierarkis sehingga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya Dinasti Umayyah pada periode akhir pemerintahannya.

Berdasarkan Tabel 1, penelitian menemukan bahwa transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah tidak hanya ditandai oleh perubahan bentuk pemerintahan dari sistem syura menjadi monarki dinasti, tetapi juga oleh proses konsolidasi kekuasaan yang semakin

terpusat. Muawiyah membangun legitimasi pemerintahan melalui kombinasi faktor politik, militer, dan religius yang memungkinkan terbentuknya struktur negara yang lebih stabil. Perluasan wilayah kekuasaan Islam turut mendorong lahirnya masyarakat yang semakin multietnis dan multikultural, sehingga membentuk struktur sosial yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Dalam perkembangan tersebut, bangsa Arab menempati posisi dominan dalam bidang politik dan administrasi, sementara kelompok mawali dan ahl al-dhimmah berada pada posisi sosial yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi kekuasaan pada masa Umayyah berpengaruh langsung terhadap pembentukan stratifikasi sosial masyarakat yang pada satu sisi mendukung stabilitas pemerintahan, tetapi pada sisi lain memunculkan ketimpangan sosial dan resistensi politik yang berkontribusi terhadap dinamika serta kemunduran dinasti pada masa berikutnya.

Tabel 2. Hubungan Transformasi Sistem Kekuasaan dan Perubahan Struktur Sosial pada Masa Dinasti Umayyah

Transformasi Kekuasaan	Kebijakan yang Diterapkan	Dampak terhadap Struktur Sosial	Analisis Sejarah Kritis
Perubahan sistem syura menjadi monarki dinasti	Pengangkatan Yazid sebagai penerus berdasarkan garis keturunan	Muncul elite politik yang terpusat pada keluarga Umayyah	Kekuasaan bergeser dari legitimasi kolektif menuju legitimasi dinasti yang berbasis pewarisan politik.
Sentralisasi pemerintahan	Pemusatan otoritas pada khalifah dan birokrasi pusat di Damaskus	Kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan memperoleh posisi sosial dan politik yang lebih tinggi	Struktur sosial semakin ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan negara.
Dominasi elite Arab dalam pemerintahan	Prioritas jabatan administratif dan militer bagi bangsa Arab	Terbentuk stratifikasi antara Arab Muslim dan mawali	Kebijakan ini menunjukkan adanya relasi kuasa berbasis etnis dalam pengelolaan negara.
Ekspansi wilayah kekuasaan	Integrasi berbagai etnis dan agama ke dalam pemerintahan Islam	Masyarakat menjadi lebih majemuk dan kompleks	Perluasan wilayah menciptakan kebutuhan akan sistem sosial dan administrasi yang lebih terstruktur.

Reformasi administrasi negara	Arabisasi birokrasi dan standarisasi administrasi	Menguatnya identitas politik Arab-Islam dalam pemerintahan	Administrasi negara digunakan sebagai instrumen legitimasi dan konsolidasi kekuasaan dinasti.
Pengelolaan kelompok non-Muslim	Penerapan sistem ahl al-dhimmah dan jizyah	Terbentuk perbedaan status sosial antara Muslim dan non-Muslim	Kebijakan ini menciptakan integrasi sosial sekaligus mempertahankan hierarki sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2, penelitian menemukan adanya hubungan yang erat antara kebijakan transformasi kekuasaan dengan perubahan struktur sosial masyarakat pada masa Dinasti Umayyah. Perubahan sistem syura menjadi monarki dinasti melalui pengangkatan Yazid sebagai penerus kekuasaan menghasilkan konsentrasi kekuasaan pada keluarga Umayyah dan menggeser pola legitimasi politik dari yang bersifat kolektif menuju pewarisan dinasti. Sentralisasi pemerintahan di Damaskus dan penguatan birokrasi menyebabkan kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan memperoleh posisi sosial dan politik yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, dominasi elite Arab dalam pemerintahan melahirkan stratifikasi sosial yang membedakan bangsa Arab dengan kelompok mawali, sementara ekspansi wilayah dan integrasi berbagai etnis serta agama menciptakan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Dalam perspektif sejarah kritis, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa administrasi negara, identitas politik Arab-Islam, dan pengelolaan kelompok non-Muslim berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan yang sekaligus membentuk hierarki sosial dalam masyarakat Dinasti Umayyah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai sumber sejarah dan literatur ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa masa Dinasti Umayyah merupakan periode penting yang ditandai oleh transformasi mendasar dalam sistem kekuasaan Islam. Perubahan tersebut terlihat dari bergesernya sistem pemilihan pemimpin yang sebelumnya didasarkan pada mekanisme musyawarah (syura) menjadi sistem monarki dinasti yang diwariskan berdasarkan garis keturunan. Transformasi ini dimulai ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menetapkan Yazid sebagai penerus kekuasaan, sehingga pola suksesi kepemimpinan tidak lagi bergantung pada kesepakatan umat atau tokoh-tokoh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan dilakukan sebagai respons terhadap kondisi politik yang tidak stabil pasca-konflik internal umat Islam pada akhir masa Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, transformasi kekuasaan pada masa Umayyah tidak hanya mencerminkan perubahan struktur pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan stabilitas politik dalam wilayah Islam yang semakin luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi sistem kekuasaan diikuti oleh penguatan sentralisasi pemerintahan dan birokrasi negara. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan perubahan orientasi politik Dinasti Umayyah. Damaskus berkembang sebagai pusat administrasi, militer, dan pengambilan keputusan yang memungkinkan kontrol lebih efektif terhadap wilayah kekuasaan yang luas. Selain itu, khalifah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan politik, pengangkatan pejabat, dan pengelolaan administrasi negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan menjadi instrumen utama dalam memperkuat legitimasi dan keberlangsungan pemerintahan Dinasti Umayyah.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Umayyah mendorong terbentuknya struktur sosial masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat Islam tidak lagi terdiri atas kelompok Arab semata, tetapi mencakup berbagai etnis, budaya, dan agama yang berada di bawah satu pemerintahan. Kondisi tersebut melahirkan stratifikasi sosial yang membedakan posisi masyarakat berdasarkan latar belakang etnis dan status keagamaan. Dalam struktur tersebut, kelompok elite penguasa dan bangsa Arab menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, perkembangan politik dan ekspansi wilayah memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan pola hubungan sosial dalam masyarakat Islam pada masa Dinasti Umayyah.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan status sosial antara bangsa Arab Muslim, mawali, dan ahl al-dhimmah. Bangsa Arab memperoleh akses yang lebih besar terhadap jabatan pemerintahan, posisi militer, serta distribusi berbagai sumber daya negara. Sementara itu, kelompok mawali atau Muslim non-Arab sering kali menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh kesempatan yang sama meskipun telah memeluk Islam. Adapun kelompok ahl al-dhimmah mendapatkan perlindungan negara dan kebebasan menjalankan agama mereka, tetapi tetap memiliki kewajiban membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur sosial pada masa Umayyah bersifat hierarkis dan dipengaruhi oleh faktor etnis, agama, serta kedekatan dengan pusat kekuasaan.


Dalam perspektif sejarah kritis, penelitian ini menemukan bahwa transformasi sistem kekuasaan dan perubahan struktur sosial memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Sentralisasi kekuasaan dan dominasi elite Arab berhasil menciptakan stabilitas politik serta mendukung efektivitas administrasi pemerintahan dalam mengelola wilayah yang luas. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di kalangan kelompok yang kurang memperoleh akses terhadap kekuasaan. Ketimpangan tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan berbagai gerakan oposisi dan konflik politik pada masa berikutnya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Dinasti Umayyah dalam membangun kekuatan politik dan administrasi negara berjalan beriringan dengan munculnya tantangan sosial yang pada akhirnya turut memengaruhi dinamika perkembangan dan kemunduran dinasti tersebut.

Pembahasan

Transformasi Sistem Kekuasaan pada Masa Dinasti Umayyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah ditandai oleh perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan dari sistem syura menuju monarki dinasti yang diwariskan berdasarkan garis keturunan. Dalam perspektif sejarah kritis, perubahan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan dari tradisi politik Islam awal, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi sosial-politik yang berkembang pasca-konflik internal umat Islam (Hafi et al., 2025; Usman & bin Abdullah, 2025). Konflik yang terjadi pada akhir masa Khulafaur Rasyidin menciptakan ketidakstabilan politik yang mengancam persatuan masyarakat Muslim dan keberlangsungan pemerintahan. Dalam situasi tersebut, kebutuhan akan sistem politik yang lebih terpusat menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas negara yang wilayahnya terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan Muawiyah dalam menetapkan Yazid sebagai penerus kekuasaan dapat dipahami sebagai strategi politik yang bertujuan memperkuat kontinuitas pemerintahan sekaligus mengurangi potensi konflik perebutan kekuasaan. Perubahan sistem kepemimpinan tersebut menunjukkan

Copyright (c) 2026 Budgeting : Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen dan Bisnis

 <https://doi.org/10.51878/budgeting.v1i2>


adanya proses adaptasi politik dalam sejarah Islam yang dipengaruhi oleh tuntutan stabilitas pemerintahan, dinamika kekuasaan, dan perkembangan masyarakat Muslim pada masa itu (Bestari & A'la, 2024; Kurniawan, 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Malahayatie (2025) yang menjelaskan bahwa pemerintahan Muawiyah dibangun melalui proses sentralisasi administrasi dan konsolidasi kekuasaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan negara. Penelitian Wati dan Amril (2025) juga menunjukkan bahwa perkembangan Dinasti Umayyah didukung oleh pembentukan sistem politik dan administrasi yang lebih terorganisasi sehingga mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam wilayah yang semakin luas. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut dibangun melalui perubahan pola legitimasi politik yang cukup mendasar dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin legitimasi diperoleh melalui musyawarah dan persetujuan umat, pada masa Umayyah legitimasi semakin terkait dengan kekuatan politik, dukungan militer, dan keberhasilan menjaga stabilitas negara. Dengan demikian, perubahan sistem pemerintahan tidak hanya mengubah mekanisme suksesi kepemimpinan, tetapi juga mengubah dasar legitimasi kekuasaan dalam masyarakat Islam.

Dalam kerangka relasi kuasa Michel Foucault, transformasi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui institusi formal, tetapi juga melalui pembentukan wacana yang menghasilkan legitimasi sosial. Dinasti Umayyah membangun narasi mengenai pentingnya persatuan umat, stabilitas politik, dan keamanan negara sebagai dasar penerimaan terhadap sistem monarki dinasti. Wacana tersebut berfungsi untuk memperkuat posisi penguasa sekaligus memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pandangan Foucault yang menempatkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebagai instrumen utama dalam membentuk cara pandang serta penerimaan masyarakat terhadap suatu tatanan sosial dan politik (Faisal, 2024). Melalui perspektif ini, perubahan sistem kekuasaan tidak semata-mata dipandang sebagai keputusan politik individual, tetapi sebagai hasil interaksi antara kebutuhan sosial, kepentingan politik, dan proses legitimasi yang berlangsung dalam masyarakat. Oleh karena itu, transformasi kekuasaan pada masa Umayyah dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan tatanan politik baru dalam sejarah Islam yang memperoleh legitimasi melalui konstruksi wacana yang dibangun oleh penguasa (Masykuroh & Setiawan, 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sentralisasi pemerintahan menjadi salah satu ciri utama sistem politik Dinasti Umayyah. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga menunjukkan pergeseran orientasi politik yang signifikan. Damaskus memiliki posisi strategis karena dekat dengan pusat perdagangan, jalur militer, dan wilayah-wilayah ekspansi Islam. Kebijakan pemindahan ibu kota tersebut mencerminkan upaya penguasa untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dalam mengelola wilayah kekuasaan yang semakin luas serta memperkuat kontrol politik terhadap daerah-daerah strategis (Bestari & A'la, 2024). Dalam perspektif sejarah kritis, pemilihan Damaskus sebagai pusat pemerintahan menunjukkan bahwa ruang geografis turut berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang mendukung proses konsolidasi politik dan administrasi negara. Posisi Damaskus sebagai pusat politik sekaligus peradaban memungkinkan berlangsungnya proses integrasi administratif, ekonomi, dan budaya yang memperkuat stabilitas pemerintahan Umayyah (Jufri, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah dan penempatan pusat kekuasaan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan negara yang kemudian memengaruhi perkembangan administrasi dan peradaban Islam pada periode-periode berikutnya (Rahman & Fadil, 2025).

Copyright (c) 2026 Budgeting : Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen dan Bisnis

 <https://doi.org/10.51878/budgeting.v1i2>

Secara keseluruhan, transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah menunjukkan adanya proses adaptasi politik terhadap perubahan kondisi sosial dan geografis dunia Islam. Sistem monarki dinasti dan sentralisasi pemerintahan berhasil menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun, perubahan tersebut juga menggeser pola hubungan antara penguasa dan masyarakat yang sebelumnya lebih menekankan prinsip musyawarah. Pergeseran ini menghasilkan perdebatan mengenai legitimasi kekuasaan yang terus berkembang dalam sejarah politik Islam. Dengan demikian, transformasi sistem kekuasaan pada masa Umayyah tidak hanya mencerminkan perubahan institusi politik, tetapi juga perubahan cara masyarakat memahami dan menerima otoritas pemerintahan.

Perubahan Struktur Sosial Masyarakat pada Masa Dinasti Umayyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Dinasti Umayyah mendorong terbentuknya struktur sosial masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh kelompok Arab berkembang menjadi komunitas yang terdiri atas berbagai etnis, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut menciptakan kebutuhan akan pengelolaan sosial yang lebih terorganisasi dalam lingkup negara yang luas serta mendorong munculnya berbagai dinamika hubungan antara kelompok Arab dan non-Arab dalam masyarakat Islam (Istighfari & Sudjatnika, 2025; Saidina, 2025). Dalam praktiknya, kondisi tersebut melahirkan stratifikasi sosial yang membedakan posisi masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kelompok mawali, misalnya, sering kali menempati posisi sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat Arab meskipun telah memeluk Islam, sehingga menunjukkan adanya hierarki sosial yang berkembang dalam struktur masyarakat Umayyah (Hana & Azis, 2023). Oleh karena itu, perubahan struktur sosial pada masa Umayyah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan ekspansi wilayah yang berlangsung secara intensif. Struktur sosial tersebut juga berkaitan dengan jaringan kekuasaan yang memengaruhi distribusi status dan akses terhadap sumber daya politik dalam masyarakat (Masykuroh, 2025).

Temuan ini mendukung penelitian Hana dan Aziz (2023) yang menyatakan bahwa masyarakat Islam klasik pada masa Dinasti Umayyah membentuk struktur hierarki sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan kebijakan kekuasaan. Penelitian Istighfari dan Sudjatnika (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan Arabisasi pada masa Umayyah memperkuat dominasi kelompok Arab dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok Arab memperoleh posisi yang lebih dominan dibandingkan kelompok non-Arab dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi tersebut tampak dalam akses terhadap jabatan pemerintahan, posisi militer, dan distribusi sumber daya negara. Dengan demikian, struktur sosial pada masa Umayyah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara status sosial dan akses terhadap kekuasaan politik.

Kelompok mawali menjadi salah satu contoh penting dari perubahan struktur sosial pada masa Umayyah. Meskipun telah memeluk Islam, kelompok ini sering tidak memperoleh kesetaraan sosial dengan Muslim Arab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zeb dan Ullah (2023) yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan diskriminasi terhadap non-Arab dalam struktur masyarakat Umayyah. Penelitian Yazıcı (2025) juga menjelaskan bahwa kebijakan mawali pada masa Umayyah memperkuat stratifikasi sosial berbasis etnis yang berdampak pada akses politik dan ekonomi. Sementara itu, Daniyal dan Bangash (2024) menegaskan bahwa sistem sosial Islam awal mengalami perubahan signifikan dari prinsip egalitarian menuju struktur hierarkis pada masa ekspansi kekuasaan. Akibatnya, muncul

ketidakpuasan sosial yang kemudian menjadi salah satu faktor penting munculnya gerakan oposisi terhadap pemerintahan Umayyah.

Selain kelompok *mawali*, keberadaan *ahl al-dhimmah* juga menunjukkan kompleksitas struktur sosial masyarakat pada masa Umayyah. Kelompok non-Muslim diberikan perlindungan negara dan kebebasan menjalankan ajaran agama mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, mereka tetap memiliki status sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat Muslim karena adanya kewajiban membayar *jizyah* serta keterbatasan tertentu dalam bidang politik. Dalam perspektif sejarah kritis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi sosial yang memungkinkan keberagaman tetap berada dalam satu sistem pemerintahan. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga mempertahankan hierarki sosial yang menempatkan kelompok masyarakat pada posisi yang berbeda sesuai status keagamaan mereka. Hal ini sejalan dengan Rahman (2025) yang menegaskan bahwa peradaban Islam berkembang melalui sistem sosial yang mampu mengakomodasi keberagaman agama, tetapi tetap menjaga struktur kewajiban dan status sosial yang berbeda di antara kelompok masyarakat. Selain itu, Zakhidov (2023) menjelaskan bahwa pengaturan status *ahl al-dhimmah* dalam sistem perpajakan negara Islam awal berfungsi sebagai instrumen administratif yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan struktur sosial-politik yang hierarkis. Lebih lanjut, Nurwidayani dan Raihana (2025) menunjukkan bahwa kelompok *ahl al-dhimmah* memiliki jaminan hak beragama dan perlindungan hukum, namun tetap berada dalam batasan tertentu terkait partisipasi politik dan posisi sosial dalam masyarakat Muslim.

Hubungan antara transformasi sistem kekuasaan dan perubahan struktur sosial terlihat dari bagaimana kebijakan politik negara memengaruhi distribusi status dan sumber daya dalam masyarakat. Sentralisasi pemerintahan dan dominasi elite Arab menghasilkan stabilitas politik yang mendukung perkembangan administrasi negara dan ekspansi wilayah Islam. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menciptakan ketimpangan sosial yang semakin nyata antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam perspektif sejarah kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi mengatur pemerintahan, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial dan distribusi hak dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan Dinasti Umayyah perlu dipahami sebagai proses yang menghasilkan kemajuan politik sekaligus melahirkan berbagai tantangan sosial yang memengaruhi perjalanan sejarah Islam pada periode berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah ditandai oleh pergeseran fundamental dari sistem syura menuju monarki dinasti yang diwariskan secara genealogis. Perubahan ini disertai dengan sentralisasi pemerintahan di Damaskus serta penguatan birokrasi sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam wilayah kekuasaan yang semakin luas. Dalam perspektif sejarah kritis, legitimasi kekuasaan tidak lagi hanya bersumber pada musyawarah, tetapi juga pada kekuatan politik, militer, dan kemampuan penguasa dalam mempertahankan stabilitas negara. Transformasi tersebut juga berdampak langsung pada pembentukan struktur sosial yang hierarkis, yang ditandai oleh dominasi elite Arab serta perbedaan posisi sosial antara *mawali* dan *ahl al-dhimmah*.

Secara implikatif, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah Islam dengan memperlihatkan keterkaitan erat antara perubahan sistem politik dan pembentukan struktur sosial masyarakat. Temuan ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bahwa kebijakan politik tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga pada distribusi kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini memperkuat pendekatan sejarah kritis dalam membaca dinamika peradaban Islam

secara lebih analitis dan kontekstual. Selain itu, pemahaman terhadap pola hubungan kekuasaan dan struktur sosial pada masa Umayyah dapat menjadi pembelajaran penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil pada konteks sosial-politik masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, N., & Arbi, A. (2024). Wujud Kemajuan Peradaban Islam Dalam Situasi Sosial Politik Pada Masa Dinasti Bani Umayyah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20354>
- Bestari, M. A. A., & A'la, A. (2024). Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah di Masa Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik, Sosial dan Budaya. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 1.
<https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/2728>
- Daniyal, M., & Bangash, S. (2024). Revisiting The Early Islamic Social Strata: A Case Study Of The Mawlis. *Journal of Religious Thoughts*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10476955>
- Faisal, F. (2024). Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Dalam Teks I La Galigo; Suatu Analisis Wacana Kritis Michel Foucault= The Relationship Between Power And Knowledge In The Text Of I La Galigo; A Michel Foucault's Critical Discourse Analysis. (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*).
<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/36598>
- Fajri, F., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2022). Potret Peradaban Islam Era Dinasti Umayyah. *Instructional Development Journal*, 5(1), 12–23.
<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/20932>
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Imāmah Dalam Islam: Kajian Historis Dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 72-87.
<https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/33>
- Hana, M. Y., & Azis, M. N. I. (2023). Dinamika Inklusi Sosial Masyarakat Islam: Posisi Kaum Mawali Dalam Pembangunan Umat Islam Di Jazirah Arab. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 4(1), 45-53.
<https://doi.org/10.24042/jhcc.v4i1.16766>
- Istighfari, T., & Sudjatnika, T. (2025). Gerakan Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah: Dampak Terhadap Masyarakat Islam Dan Non-Islam. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1694-1703. <https://doi.org/10.63822/kkzpx337>
- Jufri, R. F. (2025). Transformasi Kekuasaan Dan Kebudayaan Di Era Umayyah: Dari Arabisasi Hingga Pusat Peradaban Damaskus. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 7(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/25389>
- Kurniawan, I. C. (2025). Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Prespektif Siyasaah Syar'iyah. (*Doctoral dissertation, IAIN Metro*).
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11709>
- Larasati, S., Afrizal, & Syawaluddin. (2024). Perkembangan Peradaban Bani Umayyah. *Historical: Journal of History and Social Sciences*, 3(3), 281–293.
<https://doi.org/10.58355/historical.v3i3.115>
- Malahayatie, M. N. (2025). Sentralisasi Administrasi Keuangan Muawiyah Bin Abi Sufyan: Inspirasi Untuk Manajemen Fiskal Modern. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(1), 103–112. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.78853>

- Masykuroh, S. (2025). Jaringan Sosial Kekuasaan: Nepotisme dan Krisis Legitimasi pada Masa Khalifah Utsman bin Affan (644-656M). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 6(2). <https://doi.org/10.24042/00202562815700>
- Masykuroh, S., & Setiawan, A. M. (2026). Reconquista Dan Inkuisisi Dalam Perspektif Kekuasaan (Studi Atas De-Islamisasi Sejarah Spanyol). *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 6(3), 594-619. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i3.338>
- Maulidan, A. C., & Rhamadan, F. S. (2025). Sejarah Peradaban Dinasti Bani Umayyah 661–750 M. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/ph.v10i1.58180>
- Maysaroh. (2023). Analisis Dampak Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah Di Timur: Perspektif Sosial Dan Politik (661–750 M). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 57–61. <https://doi.org/10.57251/hij.v3i2.1466>
- Nurwidyani, I. M., & Raihana, S. N. (2025). Political And Judicial Rights Of Non-Muslims In Muslim States: A Normative And Historical Study. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 13(1), 44–57. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v13i1.1115>
- Putra, S., & Arbi. (2025). Wujud Kemajuan Peradaban Islam Dalam Situasi Sosial Politik Pada Masa Dinasti Bani Umayyah. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 6(2), 188–196. <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn/article/view/1655>
- Rahman, A. (2025). Jejak Agung Peradaban Islam: Sejarah, Budaya, dan Inovasi Global. <http://digilib.iainpare.ac.id/id/eprint/45>
- Rahman, K., & Fadil, S. J. (2025). De-Arabisasi Dan Transformasi Peradaban: Kajian Politik, Administrasi, Ekonomi, Dan Hukum Pada Dinasti Abbasiyah Periode Pertama. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 6(2), 412-436. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i2.262>
- Ridho, M. R., Umar, S., Muttaqin, A., & Al Faruq, U. (2024). Menelaah Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 595–598. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4359>
- Saidina, M. F. (2025). Perkembangan peradaban Islam dalam perspektif sosial budaya. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin*, 1(2), 130-143. <https://doi.org/10.64691/nizamiyah.v1i2.44>
- Siregar, R., & Arbi, A. (2024). Ekspansi Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah II. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/22656>
- Suyadi, A., Raharusun, A., & Kodir, A. A. (2021). Diskursus Etnisitas Dalam Studi Hadis: Mawali, Aktivisme Dan Kesalehan. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(2), 202–213. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2016643>
- Usman, Z. A., & bin Abdullah, U. (2025). Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik. *Journal of Social Studies Research*, 3(1), 124-139. <https://doi.org/10.33059/jssr.v3i1.12615>
- Usri, & Fathani, H. S. (2022). Pembaharuan Sistem Pemerintahan Pada Dinasti Umayyah Dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Islam. *Al-Mutsala*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.265>
- Wati, L., & M, A. (2025). Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(1), 96–110. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.129>
- Yazıcı, K. (2025). The Mawālī Policy Of The Umayyad Era And Its Impact On The Iranian Region. *SSD Journal*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17119682>



Zakhidov, K. (2023). Regulation Of The Status Of *Ahl Al-Dhimma* In The Tax System Of Early Arab-Muslim Statehood. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(2), 325.

<https://doi.org/10.47134/pssh.v2i2.325>

Zeb, S., & Ullah, M. Z. (2023). Social Inequality And Discontent In The Umayyad Period: A Historical Review. *GUMAN Journal of Social Sciences*, 6(4), 348–356.

<https://guman.com.pk/index.php/GUMAN/article/view/735>